

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting, dimana pajak merupakan suatu pilar utama dalam menopang jalannya pemerintahan dan pembangunan di suatu negara. Keuangan yang ditanggung oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan tidaklah sedikit dan tidak mungkin untuk ditanggung oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu pemaksimalan sumber-sumber penerimaan negara sangat dibutuhkan.

Indonesia merupakan negara berkembang sehingga tidak terlepas dari berbagai pembangunan infrastruktur, baik itu pembangunan jalan, gedung, perumahan, sarana dan prasarana lainnya. Proyek-proyek yang ada dalam konstruksi itu sendiri sebagian diisi oleh proyek pemerintah dan sisanya diperoleh dari proyek swasta. Dilihat dari perkembangannya, sektor konstruksi tidak saja berdampak pada kehidupan ekonomi, namun juga berimbas positif bagi kehidupan sosial masyarakat. Hubungan antar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat dapat dilihat dari hasil kerja para pelaku industri konstruksi. Keberadaan berbagai macam hasil pekerjaan konstruksi seperti sekolah, pusat bisnis, gedung pemerintahan, jembatan, hingga jalan raya akan menciptakan

gerak perekonomian sekaligus penopang kehidupan sosial-budaya sebuah bangsa.

Di sisi lain, apapun bentuk usahanya termasuk di bidang konstruksi atau jasa, tidak bisa lepas dari pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling besar, karena APBN sebagian besar dibiayai oleh pajak. Pajak juga memiliki potensi paling besar setiap tahunnya karena pajak meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik suatu negara.

Sejak tahun 2001, pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan PP No.140 tahun 2000 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2000. Tujuan penerbitan PP No.140 Tahun 2000 adalah untuk meningkatkan efektivitas pengenaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penggunaan PP No.140 Tahun 2000 dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sehubungan dengan penghasilan dari usaha jasa konstruksi berlangsung sampai dengan diterbitkannya PP No.51 Tahun 2008 yang ditetapkan tanggal 20 Juli 2008 dan diundangkan tanggal 23 Juli 2008. Penerbitan tersebut bertujuan untuk mengefektifkan penerimaan pajak negara dalam bidang usaha jasa konstruksi. Di dalam PP No.51 tahun 2008 terdapat perbedaan sifat dan tarif yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan dari jasa konstruksi. Pengenaan pajak terhadap penghasilan dari jasa konstruksi bersifat final untuk semua jenis kualifikasi dengan tarif yang telah ditentukan.

Munculnya peraturan ini menimbulkan masalah dalam perlakuan pajak perusahaan karena ketentuan dalam peraturan ini berlaku surut terhadap pajak-pajak yang sudah disetor dan dilaporkan untuk periode 1 Januari 2008 sedangkan peraturan dikeluarkan pada bulan Juli 2008. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan PP No.40 Tahun 2009 guna menyempurnakan PP No.51 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 diantaranya memuat ketentuan bahwa saat efektif berlakunya PP No.51 Tahun 2008 tidak dari 1 Januari 2008, melainkan untuk kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008.

Penulis tertarik meneliti masalah ini karena apabila dilihat dari latar belakang pengenaan atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sering kali mengalami perubahan.

PT Tiga Muara Jaya Surabaya merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan jasa PT Tiga Muara Jaya Surabaya untuk memperbaiki atau membangun gedung baru tidak hanya pihak swasta banyak juga instansi - instansi pemerintah yang menggunakan jasa PT Tiga Muara Jaya Surabaya Oleh karena itu penulis memilih judul :

”ASPEK PERPAJAKAN ATAS JASA KONSTRUKSI GUNA PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI PT. TIGA MUARA JAYA SURABAYA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa konstruksi di PT Tiga Muara Jaya Surabaya ?
2. Bagaimana aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa konstruksi di PT Tiga Muara Jaya Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis dan mengetahui aspek Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa konstruksi di PT. Tiga Muara Jaya Surabaya.
2. Menganalisis dan mengetahui aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa konstruksi di PT. Tiga Muara Jaya Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan dan mengetahui bagaimana aspek perpajakan pada usaha jasa konstruksi.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan informasi pelengkap dan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi perusahaan terutama dalam penerapan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai jasa konstruksi yang lebih baik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan pembandingan untuk penelitian lebih lanjut dan menambah wawasan berfikir serta memperoleh pengetahuan tentang aspek pajak pada usaha jasa konstruksi.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan tentang penelitian terdahulu yang selain menjadi rujukan juga menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Selain itu, berisi pula landasan teori yang berkaitan dengan internal audit yang mendasari penelitian ini, kerangka pemikiran serta proposisi penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, jenis sumber data, prosedur dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini dijelaskan tentang secara garis besar profil perusahaan, tentang analisis data yang diperoleh dan intepretasi hasil penelitian yang mengarah pada pemecahan masalah penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk perusahaan dan penelitian selanjutnya.